



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **POKOK-POKOK APBN TAHUN 2017**



**Konferensi Pers**

**Jakarta, 27 Oktober 2016**



# ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2017

telah menyesuaikan kondisi perekonomian global dan domestik

Indikator	2016	2017	
	APBNP	RAPBN	APBN
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,2	5,3	5,1
b. Inflasi (% , yoy)	4,0	4,0	4,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,3	5,3
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.500	13.300	13.300
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	40	45	45
f. Lifting Minyak (ribu barell per hari)	820	780	815
g. Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.150	1.150	1.150



# APBN 2017: Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif dengan Komitmen pada reformasi penganggaran serta prinsip kehati-hatian

## BELANJA YANG LEBIH PRODUKTIF :

- Fokus pada infrastruktur dan belanja sosial;
- Efisiensi pada belanja barang;
- Mempertahankan anggaran kesehatan (5%), pendidikan (20%).
- Fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian
- Mitigasi bencana alam & risiko fiskal
- Percepatan penyerapan anggaran

## SUBSIDI YANG LEBIH TEPAT SASARAN:

### Energi

- Melanjutkan subsidi untuk BBM jenis solar
- Distribusi tertutup/*targeted* Subsidi LPG 3 Kg
- Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk Subsidi listrik menggunakan basis data terpadu (PBDT 2015)

### Non Energi

- Memperbaiki ketepatan sasaran

## MEMPERKUAT DESENTRALISASI FISKAL

- Reformulasi perhitungan alokasi DAU;
- Memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan DBH
- Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar;
- Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.

## OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA YANG LEBIH REALISTIS :

- Melanjutkan dukungan insentif fiskal, mendorong iklim investasi & dunia usaha;
- Fokus penerimaan terutama pada sektor perdagangan dan WP pribadi.
- Ekstensifikasi melalui *Geo Tagging*;
- Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status wajib pajak;
- Mengoptimalkan perjanjian pajak internasional;
- Cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi pada produk tertentu (dan atau untuk mengurangi) dengan eksternalitas negatif;
- Optimalisasi PNBPN dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

## FOKUS PADA KESINAMBUNGAN FISKAL:

- Menjaga defisit dibawah 3% terhadap PDB;
- Memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah;
- Investasi pemerintah yang lebih selektif;
- Menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.



# Defisit APBN 2017 terkendali: 2,41% PDB

## Mewujudkan APBN yang lebih Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan

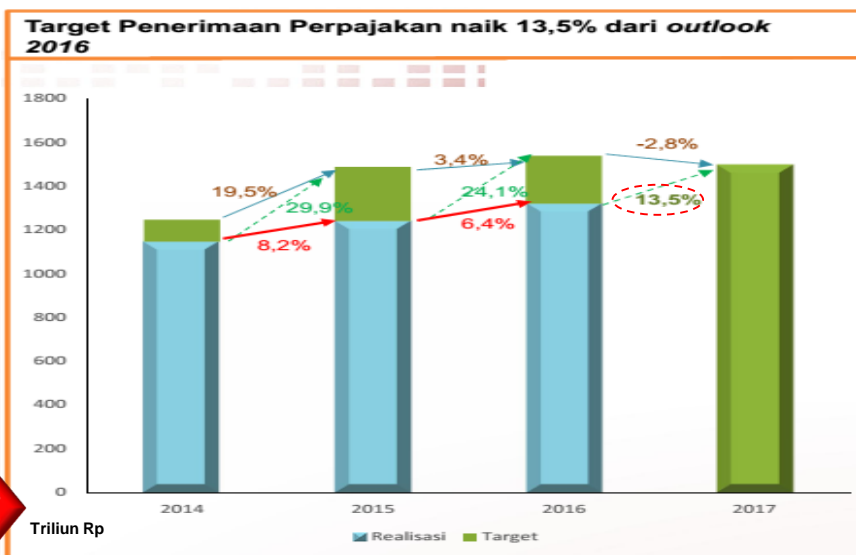
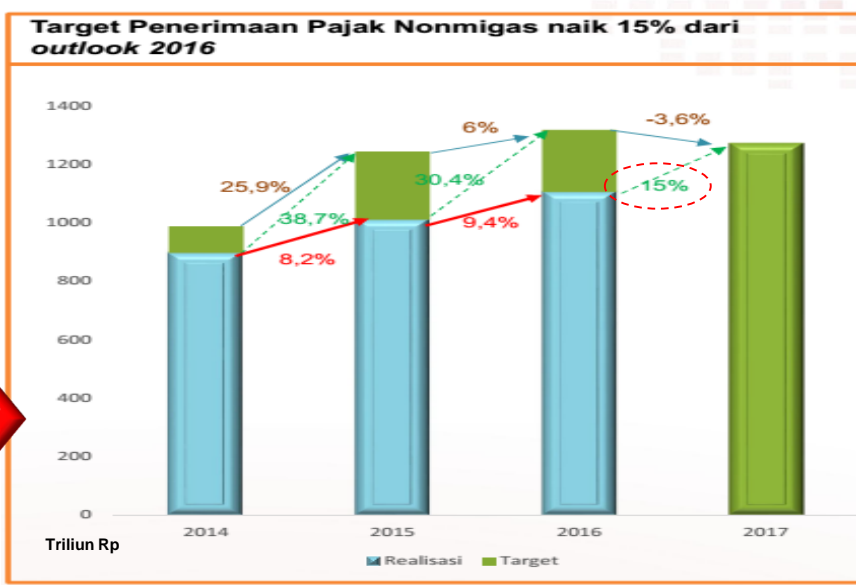
APBN (triliun Rupiah)	2014	2015	2016	2017		
	Realisasi	Realisasi	APBNP	RAPBN	APBN	Selisih
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.550,5</b>	<b>1.508,0</b>	<b>1.786,2</b>	<b>1.737,6</b>	<b>1.750,3</b>	<b>12,7</b>
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.545,5</b>	<b>1.496,0</b>	<b>1.784,2</b>	<b>1.736,3</b>	<b>1.748,9</b>	<b>12,7</b>
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.146,9	1.240,4	1.539,2	1.495,9	1.498,9	3,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	398,6	255,6	245,1	240,4	250,0	9,7
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>5,0</b>	<b>12,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>1.777,3</b>	<b>1.806,4</b>	<b>2.082,9</b>	<b>2.070,5</b>	<b>2.080,5</b>	<b>10,0</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.203,6</b>	<b>1.183,3</b>	<b>1.306,7</b>	<b>1.310,4</b>	<b>1.315,5</b>	<b>5,1</b>
1. Belanja K/L	577,2	732,1	767,8	758,4	763,6	5,2
2. Belanja Non K/L	626,3	451,2	538,9	552,1	552,0	(0,1)
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>573,7</b>	<b>623,1</b>	<b>776,3</b>	<b>760,0</b>	<b>764,9</b>	<b>4,9</b>
1. Transfer ke Daerah	573,7	602,4	729,3	700,0	704,9	4,9
2. Dana Desa	0,0	20,8	47,0	60,0	60,0	0,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(93,3)</b>	<b>(142,5)</b>	<b>(105,5)</b>	<b>(111,4)</b>	<b>(109,0)</b>	<b>2,5</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(226,7)</b>	<b>(298,5)</b>	<b>(296,7)</b>	<b>(332,8)</b>	<b>(330,2)</b>	<b>2,7</b>
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,25)</i>	<i>(2,58)</i>	<i>(2,35)</i>	<i>(2,41)</i>	<i>(2,41)</i>	<i>0,00</i>
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)</b>	<b>248,9</b>	<b>323,1</b>	<b>296,7</b>	<b>332,8</b>	<b>330,2</b>	<b>(2,7)</b>
<b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>	<b>255,7</b>	<b>380,9</b>	<b>371,6</b>	<b>389,0</b>	<b>384,7</b>	<b>(4,3)</b>
<b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>	<b>(8,9)</b>	<b>(59,7)</b>	<b>(94,0)</b>	<b>(49,1)</b>	<b>(47,5)</b>	<b>1,7</b>
<b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>	<b>(1,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,7)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>0,0</b>
<b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>19,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>



# Target Penerimaan Perpajakan tahun 2017 didasarkan perhitungan Perpajakan yang lebih rasional berdasarkan outlook 2016



Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)	2014	2015	2016	2017		
	Realisasi	Realisasi	APBNP	RAPBN	APBN	Selisih
<b>1. PPh MIGAS</b>	87,4	49,7	36,3	33,0	35,9	3,0
<b>2. PAJAK NON MIGAS</b>	897,7	1.011,2	1.318,9	1.271,7	1.271,7	0,0
a. PPh Non Migas	458,7	552,6	819,5	751,8	751,8	(0,0)
b. Pajak pertambahan nilai	409,2	423,7	474,2	493,9	493,9	0,0
c. Pajak bumi dan bangunan	23,5	29,3	17,7	17,3	17,3	0,0
d. Pajak lainnya	6,3	5,6	7,4	8,7	8,7	0,0
<b>3. KEPABEANAN DAN CUKAI</b>	161,7	179,6	184,0	191,2	191,2	0,0
a. Cukai	118,1	144,6	148,1	157,2	157,2	0,0
b. Bea masuk	32,3	31,2	33,4	33,7	33,7	0,0
c. Bea keluar	11,3	3,7	2,5	0,3	0,3	0,0
<b>JUMLAH</b>	1.146,9	1.240,4	1.539,2	1.495,9	1.498,9	3,0



→ %Pertumbuhan Target (yoy)  
→ % Pertumbuhan Target thd Real. Tahun Lalu (yoy)  
→ % Pertumbuhan Realisasi (yoy)



# Kebijakan umum Perpajakan tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan *tax base* dan kepatuhan WP

Peningkatan *tax base* dan *tax compliance*

- Optimalisasi kebijakan pengampunan pajak
- Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi
- Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga

Pemberian Insentif Perpajakan

a.l. keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri

Perbaikan Regulasi Perpajakan

RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN, dan RUU Bea Materai

Penaan Cukai untuk Pengendalian Barang Konsumsi Tertentu

Kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakan untuk menghindari dampak *negative externality*

Perpajakan Internasional untuk Mendukung Transparansi

Memacu pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, serta peningkatan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri



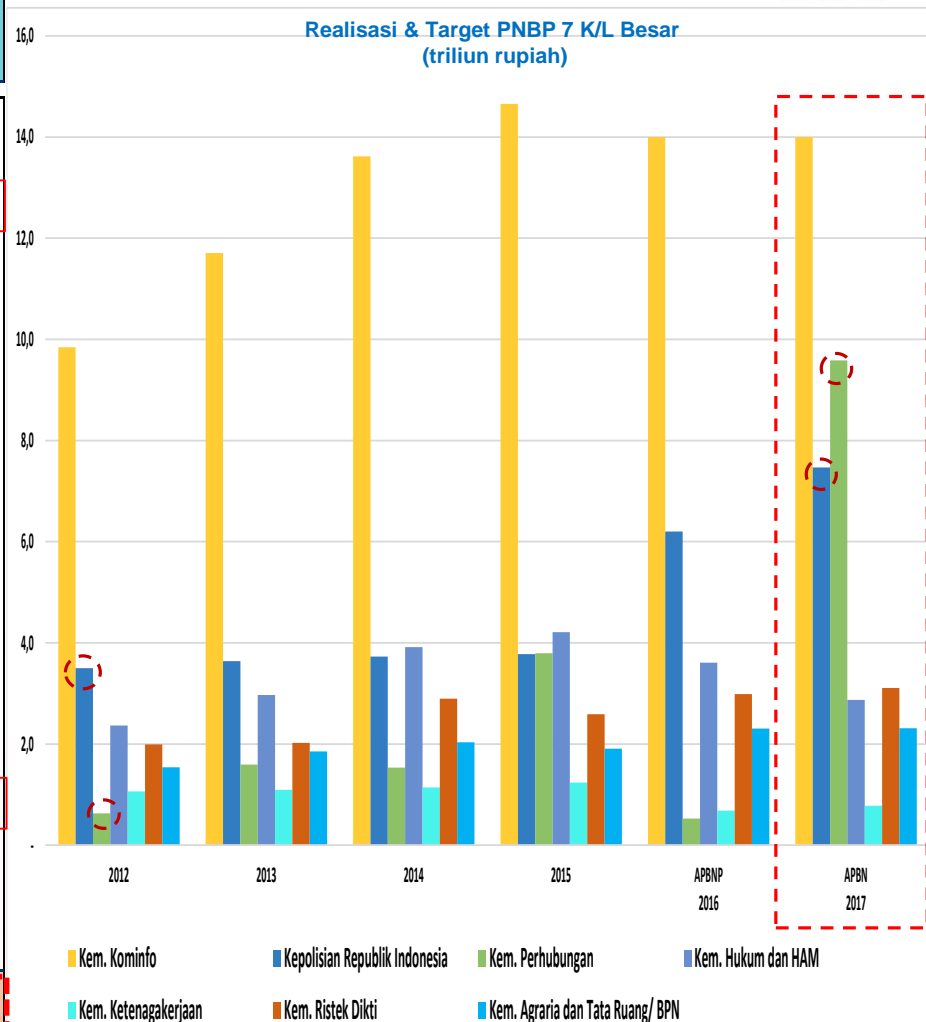


# PNBP SDA Migas meningkat sejalan kenaikan *lifting* minyak dan pengendalian *cost recovery*



PNBP (triliun Rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selisih
<b>1. Pendapatan SDA</b>	<b>80,3</b>	<b>87,0</b>	<b>6,7</b>
a. SDA Migas	57,1	63,7	6,6
- Minyak bumi	45,1	50,1	4,9
- Gas Bumi	11,9	13,6	1,7
b. Non Migas	23,2	23,3	0,1
- Pertambangan Minerba	17,7	17,7	0,0
- Panas Bumi	0,7	0,7	0,0
- Kehutanan	3,9	3,9	0,0
- Perikanan	0,9	1,0	0,1
<b>2. Pendapatan Bagian Laba BUMN</b>	<b>38,0</b>	<b>41,0</b>	<b>3,0</b>
<b>3. PNBP Lainnya</b>	<b>84,4</b>	<b>84,4</b>	<b>(0,0)</b>
- PNBP K/L	78,8	78,6	(0,1)
- DMO	5,7	5,8	0,1
<b>4. Pendapatan BLU</b>	<b>37,7</b>	<b>37,6</b>	<b>(0,0)</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>240,4</b>	<b>250,0</b>	<b>9,7</b>

Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi secara nyata meningkatkan PNBP di beberapa K/L (a.l. Polri, Kemenhub)





# Kebijakan PNBP tahun 2017 diarahkan untuk mengoptimalkan PNBP dan peran K/L



Monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tahun 2017 agar dapat berjalan tepat waktu

Sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi untuk memantau pengelolaan hutan secara *online*

Optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke *stakeholders* domestik

Koordinasi dengan Pemda dan instansi pemeriksa, guna peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP Pertambangan

Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri

Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui pemberantasan *illegal, unreported and unregulated fishing*

Meningkatkan dan mengoptimalkan PNBP K/L

Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN.





# Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2017 tetap melanjutkan efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran



Belanja K/L 2016-2017  
15 K/L Besar  
(Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selisih
1. Belanja K/L	758,4	763,6	5,2
2. Belanja Non K/L	552,1	552,0	(0,1)
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	221,4	221,2	(0,2)
b. Subsidi	174,9	160,1	(14,9)
(1) Subsidi Energi	92,2	77,3	(14,9)
a. Subsidi BBM & LPG	42,3	32,3	(10,0)
b. Subsidi Listrik	48,6	45,0	(3,6)
(2) Subsidi Non Energi	82,7	82,7	-
<b>JUMLAH</b>	<b>1.310,4</b>	<b>1.315,5</b>	<b>5,1</b>

No	Kementerian/Lembaga	2016	2017	
		APBNP	RAPBN	APBN
1	KEMENHAN	108,7	104,4	108,0
2	KEMEN PUPR	97,1	105,6	101,5
3	POLRI	79,3	72,4	84,0
4	KEMENAG	56,2	60,7	60,2
5	KEMENKES	62,7	58,3	58,3
6	KEMENHUB	42,9	48,7	46,0
7	KEMENKEU	38,1	42,2	40,8
8	KEMENDIKBUD	43,6	39,8	39,8
9	KEMEN RISTEK / DIKTI	40,6	39,4	39,7
10	KEMENTAN	27,6	23,9	22,1
11	KEMENSOS	13,1	18,3	17,5
12	KEMENKUMHAM	11,3	9,3	9,4
13	KKP	10,6	10,1	9,3
14	MA	8,8	8,5	8,2
15	KEMENLU	7,0	7,7	7,4
	15 K/L Terbesar	647,5	649,4	652,2
	K/L Lainnya	120,3	109,0	111,4
	<b>TOTAL</b>	<b>767,8</b>	<b>758,4</b>	<b>763,6</b>

1. Efisiensi pada belanja operasional dan belanja barang
2. Mendukung pembangunan infrastruktur dan konektifitas untuk meningkatkan kualitas pembangunan
3. Peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (KIP, KIS, PKH, dll.)
4. Mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan

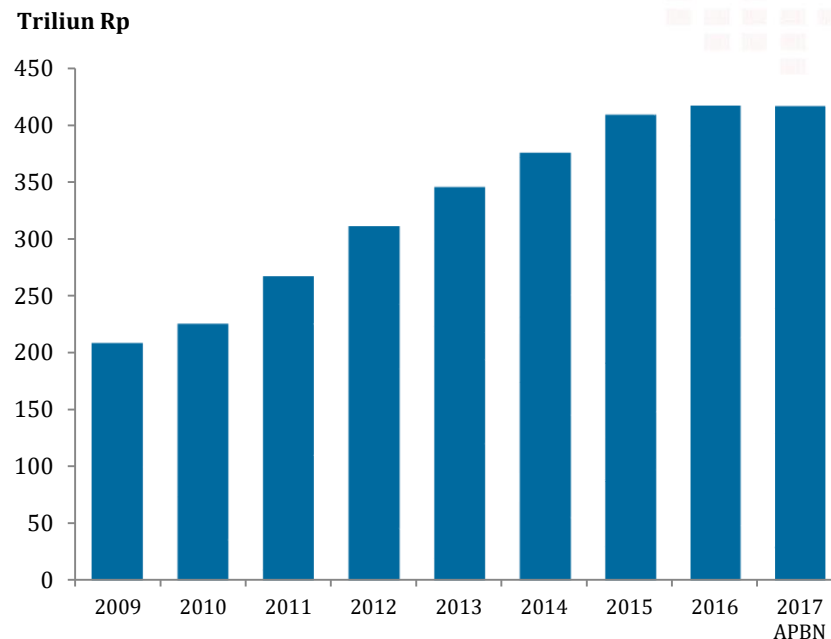
Catatan: Rincian Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis & fungsi akan disampaikan dalam Perpres rincian APBN tahun 2017 paling lambat 30 November 2016



# Anggaran Pendidikan 2017 tetap dijaga 20% dari APBN, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan



Komponen Anggaran Pendidikan (triliun rupiah)	2016	2017	
	APBNP	RAPBN	APBN
a	b	c	d
<b>1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>145,0</b>	<b>142,1</b>	<b>145,4</b>
A. Anggaran Pendidikan pada K/L	141,7	140,9	141,8
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN	3,3	1,2	3,6
<b>2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>266,6</b>	<b>269,5</b>	<b>268,2</b>
a.l. Dana Transfer Khusus	119,9	117,0	115,5
a. DAK Fisik	2,7	8,1	8,1
b. DAK Non Fisik	117,3	109,0	107,4
<b>3. Melalui Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)</b>	<b>416,6</b>	<b>414,1</b>	<b>416,1</b>
<b>5. Total Belanja Negara</b>	<b>2.082,9</b>	<b>2.070,5</b>	<b>2.080,5</b>
<b>RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5) x 100%</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>



Catatan : sasaran pembangunan RAPBN 2017

## Sasaran Pembangunan

### Sertifikasi



Sertifikasi  
101,1 ribu guru  
10,2 ribu dosen

### KIP



Kartu Indonesia Pintar  
19,5 juta siswa

### Bantuan Bidikmisi



Bantuan Bidikmisi  
360,5 ribu mahasiswa

### BOS



Bantuan Operasional Sekolah  
8,5 juta siswa

### BO PTN



Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri  
107 PTN

### Sekolah



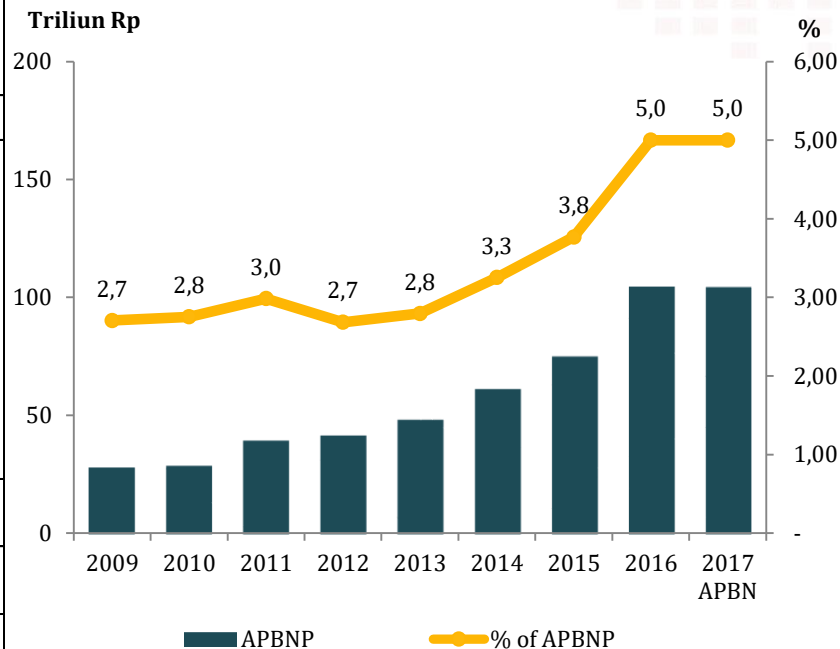
Rehabilitasi ruang kelas  
41.128 ruang



# Anggaran Kesehatan 2017 tetap dijaga 5% dari APBN, dengan fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan



Komponen Anggaran Kesehatan (triliun rupiah)	2016	2017	
	APBNP	RAPBN	APBN
a	b	c	d
<b>1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>76,1</b>	<b>74,7</b>	<b>75,2</b>
A. Anggaran Kesehatan pada K/L	70,1	65,1	65,4
B. Anggaran Kesehatan pada BA BUN	6,0	9,6	9,8
<b>2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>21,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
<b>3. Melalui Pembiayaan</b>	<b>6,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>4. Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3)</b>	<b>104,1</b>	<b>103,5</b>	<b>104,0</b>
<b>5. Total Belanja Negara</b>	<b>2.082,9</b>	<b>2.070,5</b>	<b>2.080,5</b>
<b>RASIO ANGGARAN KESEHATAN (4 : 5) x 100%</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>



Catatan: sasaran pembangunan RAPBN 2017

## Sasaran Pembangunan

### Imunisasi



Imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0-11 bulan  
**92 persen**

### PBI



PBI melalui JKN/KIS  
**94,4 juta jiwa**

### Stunting



Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak umur bawah dua tahun (Baduta)  
**29,6 persen**

### Puskesmas



Kecamatan dengan puskesmas terakreditasi  
**700 kecamatan**

### Keluarga Berencana



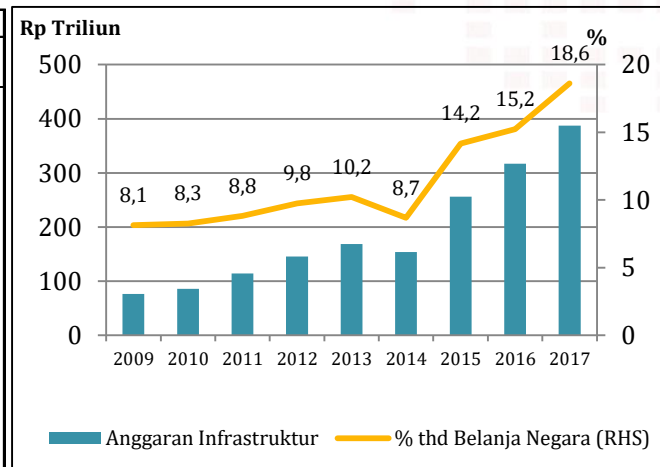
Peserta Keluarga Berencana (KB) baru  
**6,97 juta jiwa**



# Anggaran Infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat Rp40,8 T dari RAPBN 2017, terutama karena peningkatan *earmark* Dana Transfer Umum



Uraian	2016	2017	
	APBNP	RAPBN	APBN*
<b>I. Infrastruktur Ekonomi</b>	<b>307,1</b>	<b>336,9</b>	<b>377,8</b>
<b>1. Melalui Belanja K/L</b>	<b>151,2</b>	<b>161,0</b>	<b>153,7</b>
a.l. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	94,7	102,9	98,8
022 Kementerian Perhubungan	39,9	44,9	42,1
018 Kementerian Pertanian	4,1	2,9	2,7
020 Kementerian ESDM	3,7	3,8	3,6
<b>2. Melalui Belanja Non K/L</b>	<b>5,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>
a.l. 1 VGF (termasuk Cadangan VGF)	1,1	0,5	0,3
2 Belanja Hibah	4,6	2,2	2,2
<b>3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>88,0</b>	<b>133,7</b>	<b>183,7</b>
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus	66,3	33,8	32,3
2. Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur	18,8	24,0	24,0
3. Perkiraan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur		72,5	124,0
<b>4. Melalui Pembiayaan</b>	<b>62,1</b>	<b>39,5</b>	<b>37,8</b>
a.l. 1. FLPP	9,2	9,7	9,7
2. Penyertaan Modal Negara	36,2	7,2	7,2
3. BLU LMAN	16,0	21,7	20,0
<b>II. Infrastruktur Sosial</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
a.l. 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4,6	4,2	4,2
025 Kementerian Agama	1,2	1,2	1,2
<b>III. Dukungan Infrastruktur</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>
a.l. 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	0,3	0,2	0,1
019 Kementerian Perindustrian	0,4	0,6	0,6
<b>Jumlah</b>	<b>317,1</b>	<b>346,6</b>	<b>387,3</b>



## Sasaran 2017

### Jalan



Pembangunan  
815 km

### Jembatan



Pembangunan  
9.399 m

### Bandara



Pembangunan  
baru/lanjutan  
13 bandara

### Pelabuhan Laut



Pembangunan/  
pengembangan  
fasilitas  
55 lokasi

### Jalur Kereta Api



Pembangunan  
tahap I dan  
lanjutan  
550 km'sp

### Terminal Penumpang



Pembangunan  
terminal  
penumpang  
lanjutan di 3 lokasi

\* Angka sementara (menunggu Prepres tentang Rincian APBN 2017)

- Tahun 2017: sesuai PMK 48/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa → minimal 15% DBH *non-earmark* dan DAU untuk pembangunan infrastruktur. → (di UU APBN menjadi 25%)
- Untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU) minimal 25% untuk infrastruktur → meningkatkan kualitas belanja APBD

Catatan: sasaran pembangunan RAPBN 2017



# Subsidi energi diarahkan agar lebih tepat sasaran, terutama untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik...



Belanja Subsidi Energi dalam APBN 2017 sebesar Rp77,3 T



Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg → Rp32,3 T:

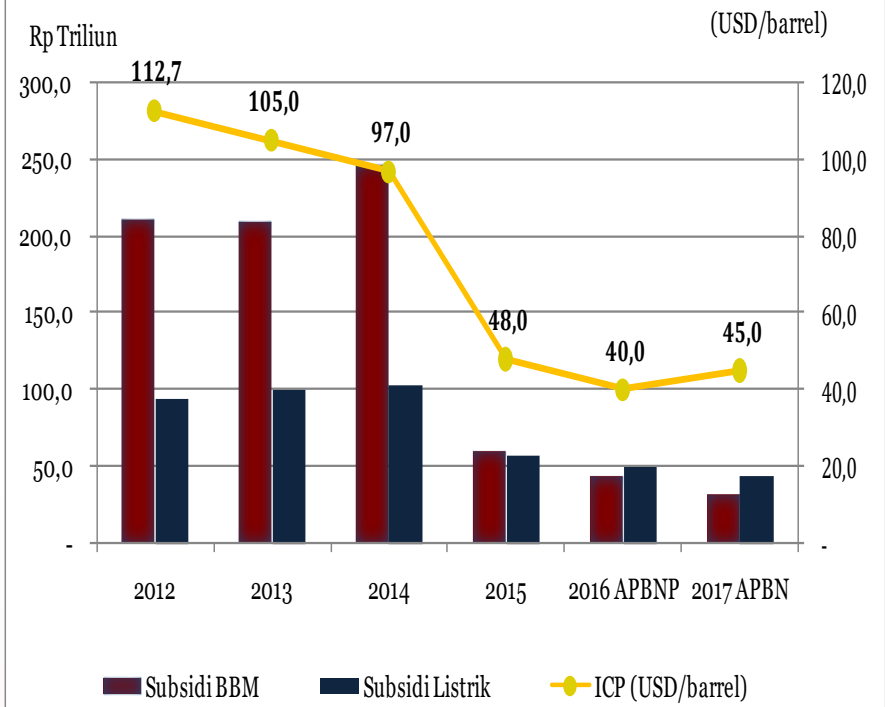
- dilakukan dengan pola distribusi tertutup/*targeted (by name and by address)*
- dilakukan secara bertahap
- 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM)
- 2,3 juta usaha mikro

Subsidi Listrik → Rp45,0 T:

- diberikan kepada 19,1 juta dengan daya R-1/450 VA dan 4,05 juta dengan R-1/900 VA
- Untuk pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900VA, tarif akan disesuaikan secara bertahap 3 kali per 2 bulan

Menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dikelola oleh TNP2K dan Kemensos

### PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI, 2012-2017

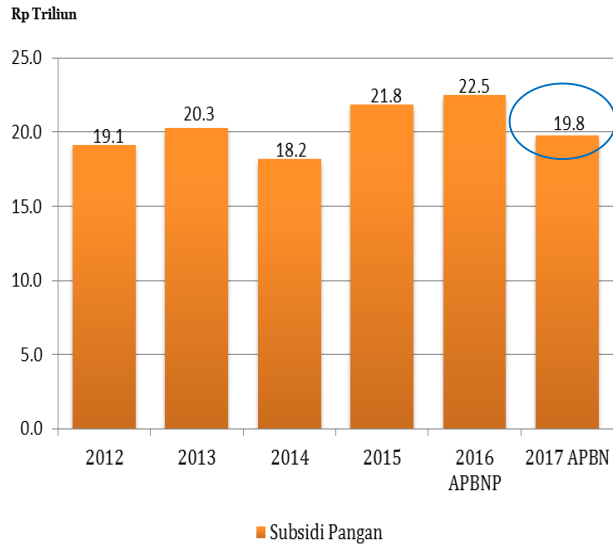


Sumber : Kementerian Keuangan



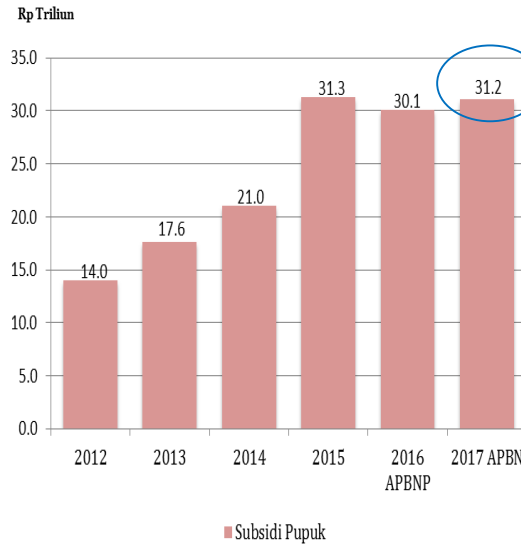
# Kebijakan subsidi pangan diarahkan untuk meningkatkan akurasi sasaran RTS dengan didukung akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran...

Subsidi Pangan, 2012-2017



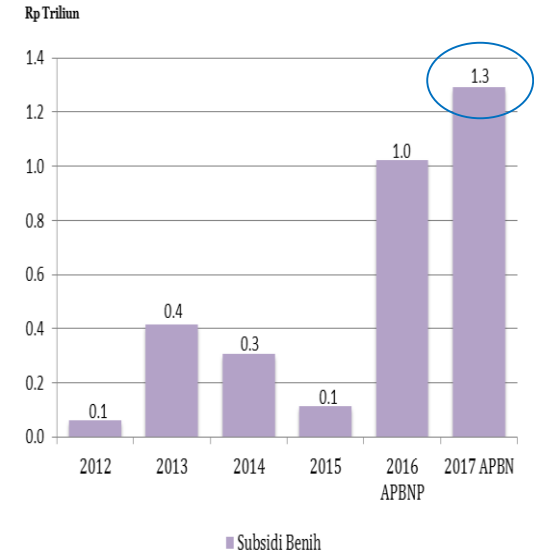
Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Pupuk, 2012-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Benih, 2012-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi pangan diberikan kpd 14,3 juta RTS

## Pengalihan Rastra menjadi Program Bantuan Pangan:

- Konversi secara bertahap Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Program Bantuan Pangan (non-tunai/voucher)
- Ujicoba di 44 kota di Indonesia

- Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian
- Volume pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton.

- Kebijakan subsidi benih diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian
- Benih bersubsidi → padi & kedelai





**Pemerintah secara konsisten berpihak kepada pengembangan UMKM dan Koperasi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR..**



**Kredit Usaha Rakyat (KUR)** adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM dan Koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*.

Sektor usaha produktif yang dibiayai KUR → pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa

### **Subsidi Bunga KUR mulai dialokasikan dalam tahun 2016 :**

- APBN 2016 sebesar Rp10.500,0 miliar
- APBN 2017 sebesar Rp9.022,0 miliar

### **Rincian Subsidi Bunga KUR dalam APBN 2017 :**

- KUR Mikro (< Rp 25 juta) : Rp6.857,0 miliar
- KUR Ritel (Rp25 – Rp500 juta) : Rp1.908,0 miliar
- KUR Penempatan TKI (< Rp25 juta) : Rp257,0 miliar



# Melanjutkan Konsolidasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017, sejalan kemampuan Fiskal dan efektivitasnya



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (triliun Rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selisih
<b>A. Transfer ke Daerah</b>	<b>700,0</b>	<b>704,9</b>	<b>4,9</b>
1. Dana Perimbangan	672,0	677,1	5,0
a. Dana Transfer Umum	495,6	503,6	8,1
1) Dana Bagi Hasil	90,8	92,8	2,0
2) Dana Alokasi Umum	404,7	410,8	6,1
b. Dana Transfer Khusus	176,5	173,4	(3,0)
2. Dana Insentif Daerah	7,5	7,5	0,0
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	20,5	20,3	(0,1)
<b>B. Dana Desa</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>760,0</b>	<b>764,9</b>	<b>4,9</b>

- **Dana Alokasi Umum :**
  - Perhitungan PDN neto tidak bersifat final;
  - memenuhi kewajiban kepada beberapa daerah yang DAUnya sempat tertunda pada tahun 2016;
  - 25% dialokasikan untuk infrastruktur.
- **Dana Bagi Hasil :**
  - Meningkatkan sesuai kenaikan PNBPN yang dibagihasilkan



# Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 diarahkan untuk memperkuat implementasi Desentralisasi Fiskal dan Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa



**Anggaran TKDD Rp764,9 triliun, lebih besar Rp1,3 triliun dari anggaran K/L sebesar Rp763,6 triliun**

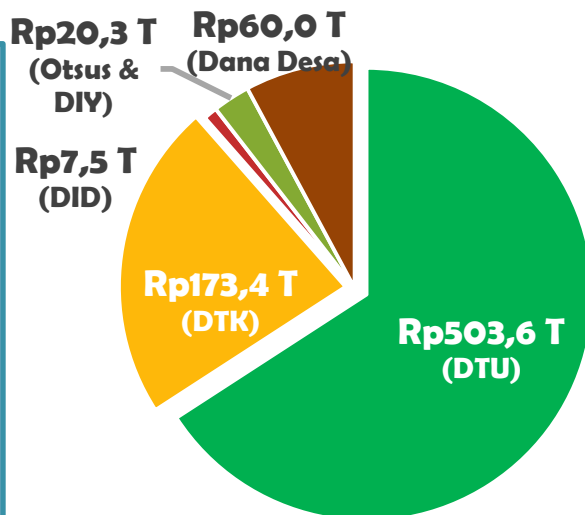
Memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah

## Kebijakan Dana Transfer Umum (DTU)

Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui:

- Perbaiki pengalokasian, penyaluran, & penggunaan DBH.
- Pengalokasian DAU:
  - ✓ memperhitungkan pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab/kota ke provinsi.
  - ✓ DAU semua Provinsi naik.
  - ✓ DAU Kab./Kota tidak mengalami penurunan.
- Pagu DAU nasional dalam APBN dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto, dengan memperhatikan daerah-daerah yang kapasitas & ruang fiskalnya sangat terbatas.
- DTU dipergunakan sekurangnya 25% untuk percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik.

ALOKASI TKDD TA 2017



## Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK)

Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus melalui:

- Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.
- Pelaksanaan sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antarbidang, antardaerah, dan antara DAK & nonDAK.
- Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai kebutuhan riil untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.
- Pengalokasian Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah sangat tertinggal dan Dana Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

## Kebijakan Dana Insentif Daerah

- Alokasi anggaran DID ditingkatkan untuk memberi penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi & kesejahteraan.
- Terdapat 317 daerah penerima DID.
- Alokasi DID minimum Rp7,5 miliar.
- Alokasi DID tertinggi Rp65,3 miliar.

## Kebijakan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

- Meningkatkan efisiensi & efektivitas pemanfaatan Dana Otsus & Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta.
- Dana Otsus Papua Rp5,6 triliun.
- Dana Otsus Papua Barat Rp2,4 triliun.
- Dana Otsus Aceh Rp8,0 triliun.
- DTI Papua & Papua Barat Rp3,5 triliun.
- Dana Keistimewaan DIY Rp800 miliar.

## Kebijakan Dana Desa

- Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa dgn tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.
- Rata-rata alokasi per Desa Rp800,5 juta.
- Dana Desa per Desa paling kecil Rp726,7 juta.
- Dana Desa per Desa paling besar Rp2,8 miar.



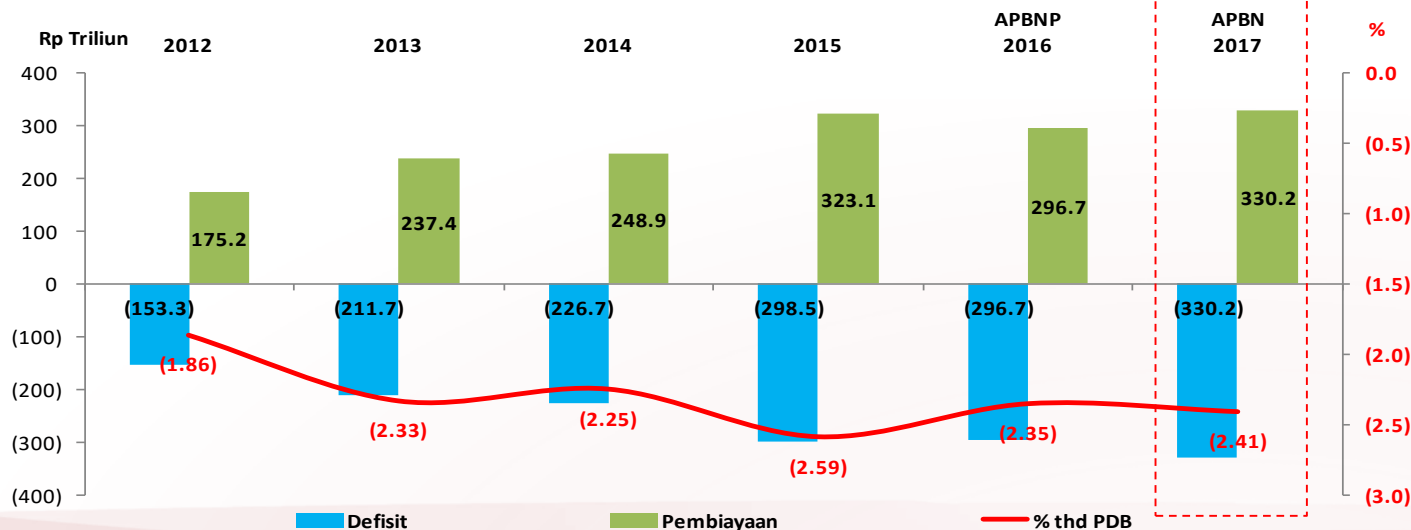
# Pembiayaan Defisit Anggaran tahun 2017 untuk mendukung pembangunan yang produktif



Pembiayaan Anggaran (triliun Rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selisih
<b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>	<b>389,0</b>	<b>384,7</b>	<b>(4,3)</b>
a. Surat Berharga Negara (neto)	404,3	400,0	(4,3)
b. Pinjaman (neto)	(15,3)	(15,3)	0,0
<b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>	<b>(49,1)</b>	<b>(47,5)</b>	<b>1,7</b>
a. Investasi kepada BUMN	(4,0)	(4,0)	0,0
b. Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	(3,2)	(6,8)	(3,6)
c. Investasi kepada BLU	(34,9)	(34,7)	0,2
d. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha	(2,0)	(2,0)	0,0
e. Penerimaan Kembali Investasi	0,0	0,0	0,0
f. Cadangan Pembiayaan Investasi	(5,1)	0,0	5,1
<b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>0,0</b>
a. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(6,4)	(6,4)	0,0
b. Cadangan Pemberian Pinjaman	0,0	0,0	0,0
<b>IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>0,0</b>
<b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
a. Saldo Anggaran Lebih	0,0	0,0	0,0
b. Hasil Pengelolaan Aset	0,3	0,3	0,0
<b>JUMLAH</b>	<b>332,8</b>	<b>330,2</b>	<b>(2,7)</b>

## Defisit ekspansif dan terarah:

- Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan & berkeadilan,
- Mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi & daya saing,
- Diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, a.l. mengendalikan rasio utang terhadap PDB, mengendalikan keseimbangan primer

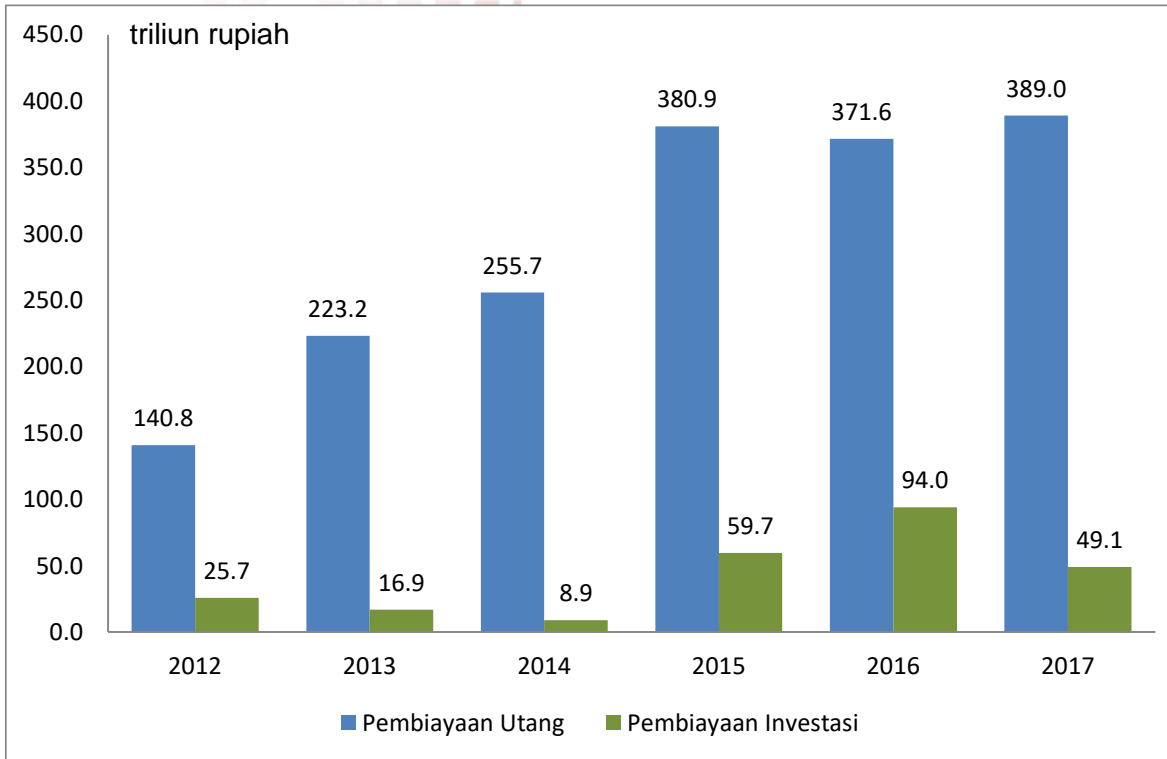


**Prioritas Pembangunan Nasional**

**Kebijakan Fiskal 2017 : Ekspansif**



# Pengendalian Pembiayaan Utang dalam batas yang wajar dan terjaga serta pembiayaan investasi untuk mendorong sektor prioritas dan kegiatan ekonomi masyarakat



## Strategi pembiayaan utang:

1. Penerbitan SBN diprioritaskan:  
(a) mata uang rupiah; (b) bunga tetap, dan; (c) tenor menengah-panjang;
2. Pinjaman Dalam Negeri difokuskan untuk pemberdayaan industri dalam negeri;
3. Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pelabuhan, jalur kereta api, dan rehabilitasi pemukiman.

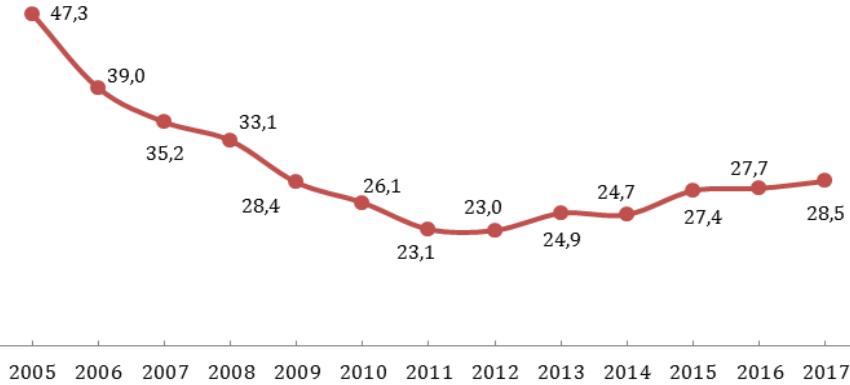
Strategi Pembiayaan Investasi: (1) PMN untuk mendukung infrastruktur (PT PII, PT SMF, dan PT SMI); (2) Dana Bergulir pembiayaan perumahan guna mendukung program sejuta rumah; (3) Investasi kepada BLU LMAN guna mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur; dan (4) Investasi kepada BLU PIP guna mendukung akses pembiayaan bagi UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.



# Rasio Utang cenderung turun, namun sedikit meningkat 5 tahun terakhir untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan

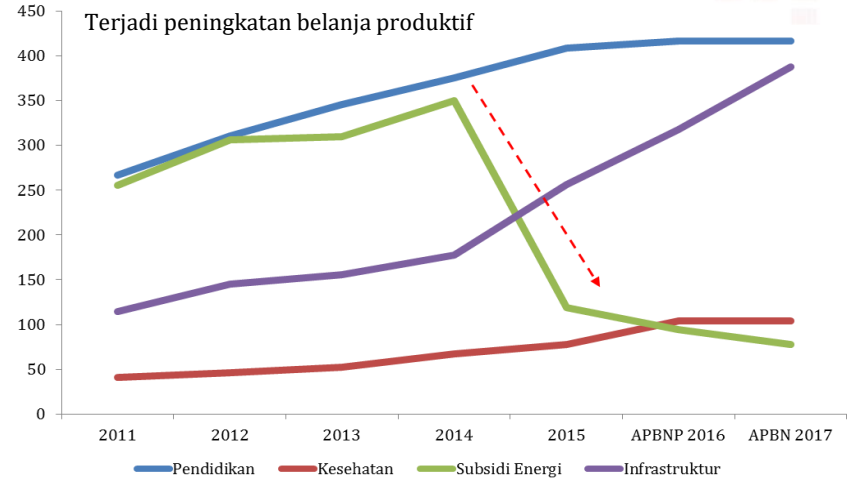


**Rasio Utang Indonesia thd PDB 2005-2017**

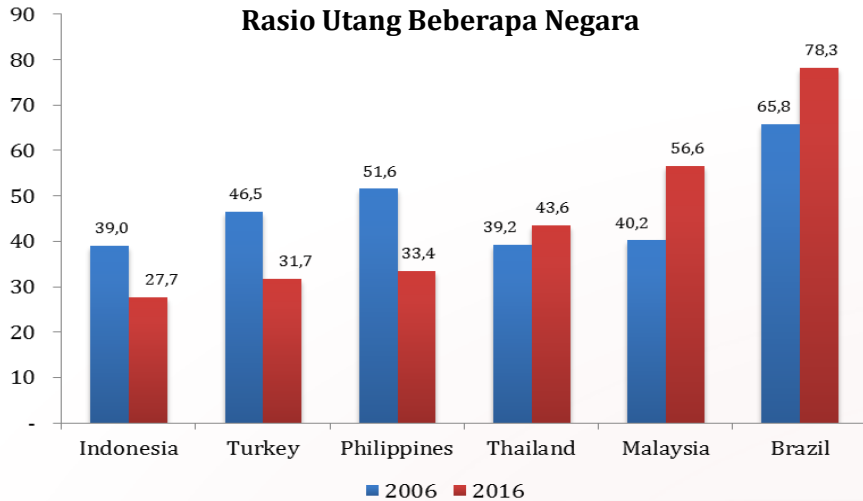


**Triliun Rupiah**

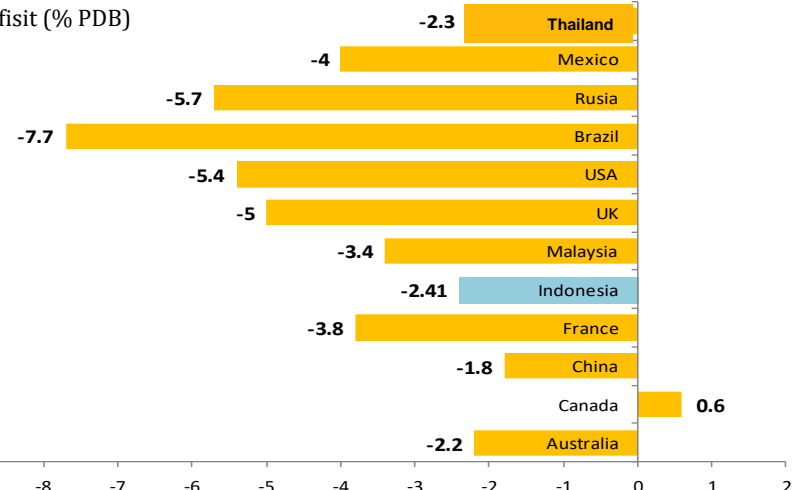
Terjadi peningkatan belanja produktif



**Rasio Utang Beberapa Negara**



**Defisit (% PDB)**







**TERIMA KASIH**



## TARGET PEMBANGUNAN



... dalam rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas ...

Asumsi	2016	2017	
	APBN	RAPBN	APBN
1. Pengangguran (%)	5,2 - 5,5%	5,3 - 5,6	5,6
2. Angka Kemiskinan (%)	9,0-10,0%	9,5 - 10,5	10,5
3. Gini Rasio (indeks)	0,4	0,38	0,39
4. Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru)	75,3*	75,3*	70,1

\* = Angka RPJMN menggunakan metode lama (komponen terdiri dari usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan pengeluaran per-kapita)



# KEBIJAKAN STRATEGIS

## Optimalisasi pendapatan, Penguatan kualitas belanja & pengendalian risiko



1

Defisit terkendali  
2,41% (dibawah 3%)



2

Konsisten akselerasi  
pembangunan  
infrastruktur



3

Anggaran Kesehatan  
mencapai 5% mulai 2016



4

Menjaga Anggaran  
pendidikan 20%



5

Mendukung keberlanjutan  
JKN (cadangan  
pembiayaan Rp3,6T)



6

Program 1 Juta Rumah  
(subsidi bunga, uang  
muka & FLPP)



7

Penguatan  
**desentralisasi fiskal**  
(DAK berbasis proposal,  
Dana Desa dan DID)



8

Efisiensi birokrasi :  
**tetap memberi THR  
dan Gaji 13**



9

Percepatan pengurangan  
kesenjangan (peningkatan  
cakupan PKH, PBI)



10

Reformasi Subsidi lebih  
tepat sasaran (**sinergi  
Rastra & PKH**)



11

Optimalisasi pajak yang  
realistis melalui terobosan  
(melanjutkan *tax amnesty*)



12

Mendorong peningkatan  
ekspor melalui **Program  
NIA**



## BELANJA K/L, APBN TAHUN 2017...(1) (triliun rupiah)



No	Kementerian/Lembaga	2016	2017	
		APBNP	RAPBN	APBN
1	KEMENHAN	108,7	104,4	108,0
2	KEMEN PUPR	97,1	105,6	101,5
3	POLRI	79,3	72,4	84,0
4	KEMENAG	56,2	60,7	60,2
5	KEMENKES	62,7	58,3	58,3
6	KEMENHUB	42,9	48,7	46,0
7	KEMENKEU	38,1	42,2	40,8
8	KEMENDIKBUD	43,6	39,8	39,8
9	KEMEN RISTEK / DIKTI	40,6	39,4	39,7
10	KEMENTAN	27,6	23,9	22,1
11	KEMENSOS	13,1	18,3	17,5
12	KEMENKUMHAM	11,3	9,3	9,4
13	KKP	10,6	10,1	9,3
14	MA	8,8	8,5	8,2
15	KEMENLU	7,0	7,7	7,4
16	KEMEN ESDM	7,7	7,3	7,0
17	KEMEN LH / KEHUTANAN	5,9	7,0	6,8
18	KEMEN ATR / BPN	6,0	5,6	5,5
19	BIN	2,4	1,9	5,3
20	KEMEN DESA, PDT DAN TRANS.	8,6	5,1	4,9
21	KOMINFO	5,1	4,9	4,8
22	BPS	4,9	4,5	4,3
23	DPR	4,7	4,5	4,3
24	KEJAKSAAN	5,3	4,3	4,1
25	KEMENPAR	4,2	3,8	3,8



## BELANJA K/L, APBN TAHUN 2017...(2) (triliun rupiah)



No	Kementerian/Lembaga	2016	2017	
		APBNP	RAPBN	APBN
26	KEMEN NAKER	3,0	3,6	3,5
27	KEMENDAG	3,7	3,5	3,4
28	BKKBN	3,6	3,4	3,4
29	KEMENDAGRI	3,8	3,4	3,3
30	KEMENPORA	2,7	2,8	3,1
31	KEMENPERIN	3,0	2,9	2,8
32	BPK	3,4	2,9	2,7
33	BASARNAS	2,3	2,1	2,2
34	KPU	1,9	1,9	1,9
35	BPOM	1,5	1,8	1,8
36	BPKPB BATAM	1,2	1,8	1,8
37	KEMENSETNEG	2,1	1,8	1,7
38	BMKG	1,4	1,7	1,6
39	BPKP	1,6	1,5	1,4
40	BAPPENAS	1,4	1,4	1,4
41	BNN	2,5	1,4	1,3
42	BNPB	2,2	0,7	1,2
43	BPPT	0,9	0,9	1,1
44	LSN	1,7	0,7	1,1
45	LIPI	1,2	1,1	1,1
46	KEMEN KUKM	1,1	1,0	1,0
47	DPD	0,8	1,0	1,0
48	BAKAMLA	1,9	1,0	1,0
49	LPP RRI	1,0	1,0	0,9
50	BADAN EKONOMI KREATIF	1,0	0,9	0,9



## BELANJA K/L, APBN TAHUN 2017...(3) (triliun rupiah)



No	Kementerian/Lembaga	2016	2017	
		APBNP	RAPBN	APBN
51	MPR	0,8	0,9	0,9
52	BIG	0,7	0,9	0,8
53	LPP TVRI	0,9	0,8	0,8
54	BATAN	0,8	0,8	0,7
55	KPK	1,0	0,8	0,7
56	LAPAN	0,7	0,7	0,7
57	BKN	0,5	0,6	0,6
58	KEMENNEG PP & PA	0,7	0,6	0,6
59	PNRI	0,8	0,6	0,6
60	BKPM	0,5	0,5	0,5
61	BNPT	0,7	0,5	0,5
62	BAWASLU	0,5	0,5	0,5
63	BPLS	0,5	0,5	0,5
64	BNP2TKI	0,3	0,4	0,4
65	KEMENKO PMK	0,4	0,4	0,4
66	KEMENKO BID. KEMARITIMAN	0,4	0,4	0,4
67	KEMENKO PEREKONOMIAN	0,4	0,4	0,4
68	LAN	0,3	0,3	0,3
69	LEMHANAS	0,3	0,3	0,3
70	KEMENKO POLHUKAM	0,3	0,3	0,3
71	BPWS	0,3	0,3	0,3
72	MK	0,3	0,3	0,3
73	BPKPB SABANG	0,2	0,2	0,2
74	KEMENTERIAN BUMN	0,2	0,2	0,2
75	ANRI	0,2	0,2	0,2





## BELANJA K/L, APBN TAHUN 2017...(4) (triliun rupiah)



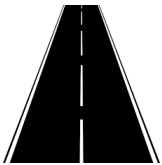
No	Kementerian/Lembaga	2016	2017	
		APBNP	RAPBN	APBN
76	SETKAB	0,2	0,2	0,2
77	LKPP	0,2	0,2	0,2
78	KEMENNEG PAN	0,2	0,2	0,2
79	BNPP	0,2	0,2	0,2
80	BSN	0,1	0,2	0,2
81	BAPETEN	0,2	0,2	0,2
82	WANTANAS	0,2	0,0	0,2
83	KPPU	0,1	0,1	0,1
84	OMBUDSMAN RI	0,2	0,1	0,1
85	PPATK	0,2	0,1	0,1
86	KY RI	0,1	0,1	0,1
87	KOMNASHAM	0,1	0,1	0,1
	<b>TOTAL</b>	<b>767,8</b>	<b>758,4</b>	<b>763,6</b>



# SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 (1)

## Infrastruktur

### Jalan



Pembangunan  
**815 km**

### Jembatan



Pembangunan  
**9.399 m**

### Jalur Kereta Api



Pembangunan tahap I  
dan lanjutan  
**550 km'sp**

### Pelabuhan Laut



Pembangunan/  
pengembangan  
fasilitas  
**55 lokasi**

### Bandara



Pembangunan  
baru/lanjutan  
**13 bandara**

## Perlindungan Sosial

### PKH



Program Keluarga  
harapan  
**6 juta Rumah Tangga**  
Sasaran (RTS)

### Rastra



Penyaluran Subsidi Pangan  
**14,3 juta rumah tangga**  
sasaran penerima manfaat  
(RTS PM)

### Voucher Bantuan pangan



Voucher bantuan pangan di 44 kota  
besar dengan target sasaran  
**1,2 rumah tangga** sasaran  
penerima manfaat (RTS PM)



# SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 (2)

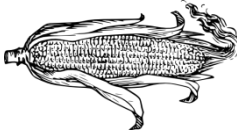
## Kedaulatan Pangan

### Padi



Produksi  
**77 juta ton**

### Jagung



Produksi  
**22,4 juta ton**

### Irigasi tersier



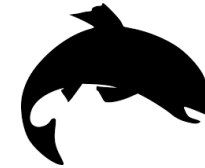
Rehabilitasi dan pembangunan jaringan untuk  
**200 ribu ha sawah**

### Cetak Sawah



Perluasan areal pertanian/cetak sawah seluas  
**144.613 ha**

### Perikanan



Produksi  
**6,67 juta ton**  
(perikanan tangkap)  
**9,41 juta ton**  
(perikanan budidaya)

### Garam



Produksi garam rakyat  
**3,2 juta ton**

## Kedaulatan Energi

### Elektrifikasi



Rasio  
**92,75 %**

### Jaringan Gas Bumi



Untuk rumah tangga/jaringan gas kota  
**64,2 ribu sambungan rumah tangga**

### Pembangkit Listrik



Pembangunan dari aneka energi baru terbarukan (EBT)  
**128 unit**

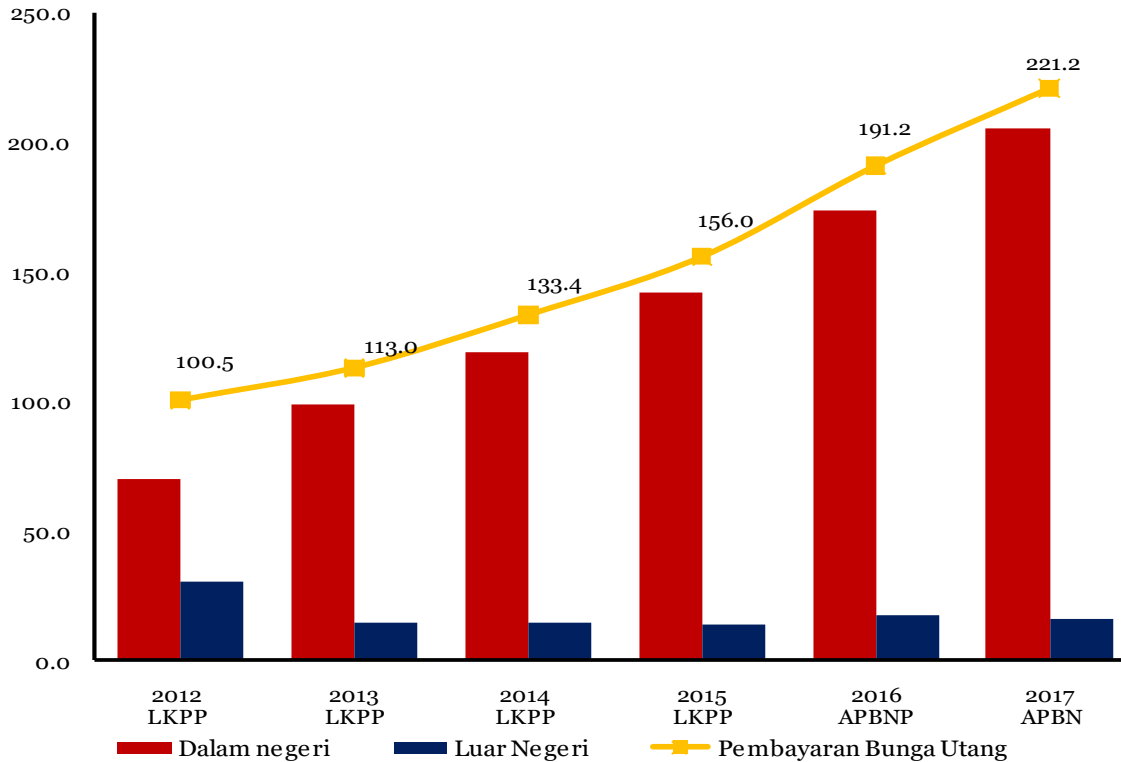


# Program Pengelolaan Utang Negara 2017



**Perkembangan Program Pengelolaan Utang Negara  
(Pembayaran Bunga Utang)**

Triliun Rp



Keterangan:  
Tahun 2012 -2015 menggunakan angka LKPP (audited)

Sumber : Kementerian Keuangan.

Pembayaran bunga utang dalam APBN 2017 dialokasikan sebesar Rp221,2 triliun dengan pokok-pokok kebijakan:

1. Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah;
2. Mengefisienkan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang, melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai.



# Reformasi Subsidi terus berlanjut di tahun 2017, dan diarahkan untuk lebih efisien dan tepat sasaran.



Uraian (triliun Rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selisih
<b>A. Subsidi Energi</b>	<b>92,2</b>	<b>77,3</b>	<b>(14,9)</b>
1. Subsidi BBM & LPG	42,3	32,3	(10,0)
2. Subsidi Listrik	48,6	45,0	(3,6)
3. Subsidi Energi Baru Terbarukan (EBT)	1,3	0,0	(1,3)
<b>B. Subsidi Non Energi</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>0,0</b>
1) Pangan	19,8	19,8	0,0
2) Pupuk	31,2	31,2	0,0
3) Benih	1,3	1,3	0,0
4) PSO	4,3	4,3	0,0
5) Subsidi Bunga Kredit Program	15,8	15,8	0,0
6) Subsidi Pajak / Pajak DTP	10,3	10,3	0,0
<b>JUMLAH</b>	<b>174,9</b>	<b>160,1</b>	<b>(14,9)</b>



# KEBIJAKAN DBH DALAM APBN TA 2017



Anggaran DBH sebesar Rp92,8 triliun

1. DBH Pajak dan SDA sebesar Rp82 triliun
2. Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA sebesar Rp10,8 triliun

## PBB

1. Penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% dibagi secara merata kepada kab/kota.
2. Biaya Pemungutan PBB digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

## Penggunaan DBH MIGAS

DBH SDA Migas sebesar 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (*block grant*), tidak lagi diwajibkan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

## Penggunaan Cukai Hasil Tembakau

1. Paling sedikit 50% untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
2. Paling banyak 50% untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

## Pengalihan Kewenangan

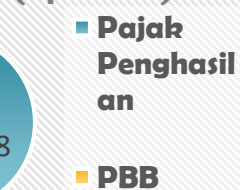
DBH Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai tahun 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan.

## Penggunaan DBH Dana Reboisasi

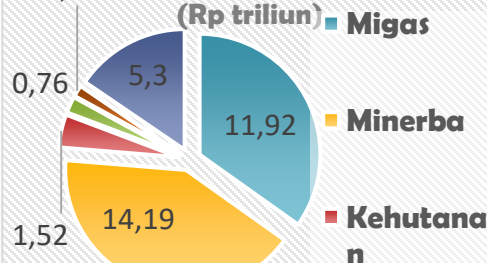
Perluasan penggunaan DBH SDA Kehutanan dari DR untuk:

- Pengelolaan taman hutan raya (tahura);
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
- Penataan batasan kawasan;
- Pengawasan dan perlindungan;
- Penanaman pohon daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;
- Pengembangan perbenihan; dan/atau
- Penelitian dan pengembangan, antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur.

DBH Pajak (Rp triliun)



DBH SDA (Rp triliun)







# KEBIJAKAN DAU DALAM APBN TA 2017



Anggaran DAU sebesar Rp410,8 triliun, terdiri atas:

1. DAU murni sebesar Rp401,1 triliun.
2. Kurang Bayar atas sisa penundaan sebagian DAU TA 2016 sebesar Rp9,7 triliun.

1

Memperbaiki bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

2

Memperhitungkan dampak pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dalam pengalokasian DAU kepada provinsi.

3

Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah.

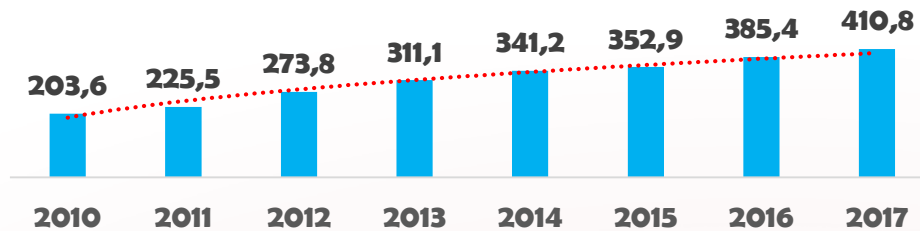
4

Menerapkan kebijakan alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.

5

Pagu DAU nasional dalam APBN dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto dengan memperhatikan daerah-daerah yang kapasitas & ruang fiskalnya sangat terbatas.

Trend DAU (triliun Rp)



6

Memenuhi kurang bayar atas sisa penundaan sebagian DAU TA 2016.



# KEBIJAKAN DAK FISIK DALAM APBN TA 2017

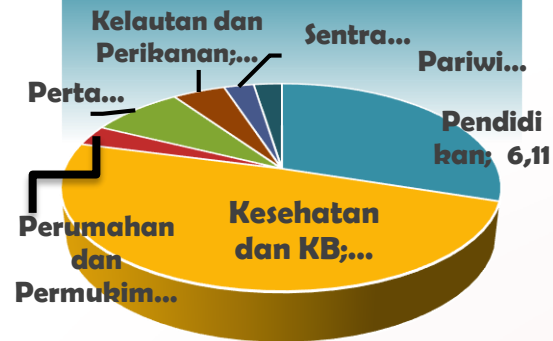


(Total DAK FISIK Rp58,3 triliun)

1. Mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.
2. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional.
3. Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dalam rangka pengalokasian DAK, yaitu rencana kegiatan antar bidang/subbidang DAK, antar daerah, dan antara DAK dengan pendanaan selain DAK dengan mengoptimalkan peran Provinsi.
4. Menghilangkan kewajiban Daerah untuk menyediakan dana pendamping.
5. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik.
6. Mempercepat penetapan petunjuk teknis DAK dan pemberlakuan petunjuk teknis minimal 3 tahun yang ditetapkan dengan peraturan presiden.

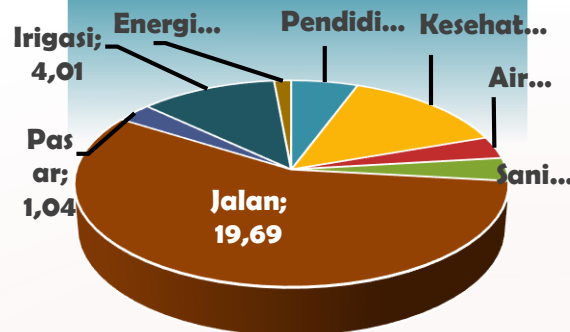
DAK Reguler sebesar Rp20,4 T

Pencapaian pemenuhan pelayanan publik



DAK Penugasan sebesar Rp34,5 T

Pencapaian sasaran prioritas nasional



DAK Afirmasi sebesar Rp3,5 T

percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi



# KEBIJAKAN DAK NONFISIK DALAM APBN TA 2017

## (Total DAK Nonfisik Rp 115.1 triliun)



### **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dialokasikan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan kegiatan lain sesuai Juknis Mendikbud.

### **Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)**

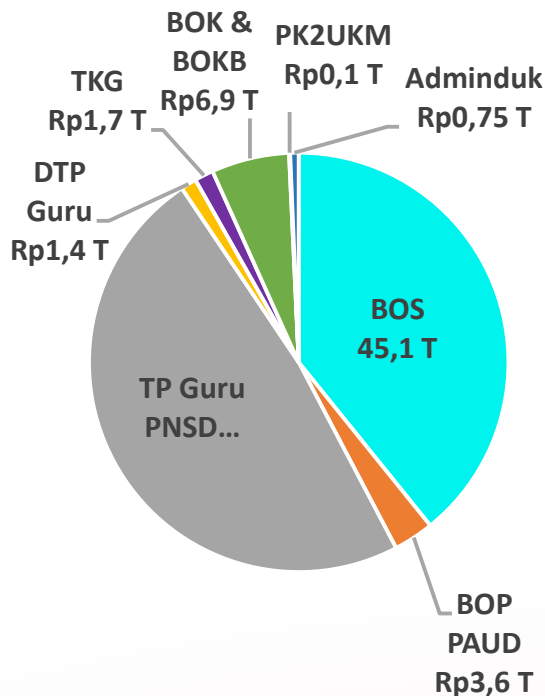
Dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan yang mempunyai peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.

### **Tunjangan Profesi Guru PNSD (TP Guru PNSD)**

Diberikan kepada Guru PNSD yang bersertifikat pendidik & besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan selama 12 bulan.

### **Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD)**

Diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan TPG PNSD dan besarnya Rp250.000 per bulan selama 12 bulan.



### **Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus**

Diberikan kepada Guru PNSD di desa sangat tertinggal untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas, besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan selama 12 bulan.

### **Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)**

- Dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan puskesmas.
- Dialokasikan dalam APBN untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses & kualitas pelayanan KB yang merata.

### **Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)**

Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM.

### **Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan.



# KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH DALAM APBN TA 2017



## 1) KEBIJAKAN :

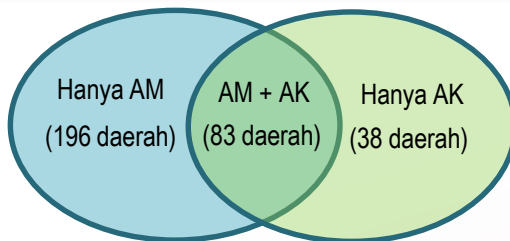
- Ditujukan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan **Kriteria Utama** dan **Kriteria Kinerja**;
- Kriteria utama, terdiri atas:
  - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP atau WDP.
  - Penetapan Perda APBD tepat waktu.
- Kriteria kinerja, terdiri atas:
  - Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
  - Kinerja pelayanan dasar publik.
  - Kinerja ekonomi dan kesejahteraan

## 2) ALOKASI :

$$\text{ALOKASI DID} = \text{ALOKASI MINIMUM} + \text{ALOKASI KINERJA}$$

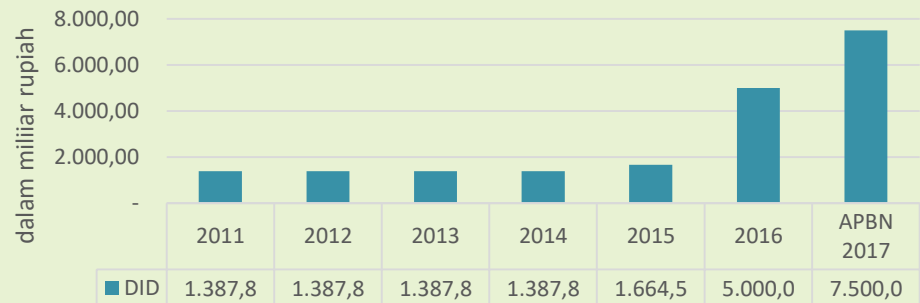
- Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari :
  - Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 Triliun  
Diberikan kepada daerah yang memperoleh opini WTP dan menetapkan Perda APBD tepat waktu.
  - Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 Triliun  
Diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi batas minimum nilai kinerja yaitu BB (nilai kinerja  $\geq 68,33$ )
- Total daerah penerima DID tahun 2017 sebanyak 317 daerah, terdiri dari:
  - 21 provinsi,
  - 232 kabupaten, dan
  - 64 kota

### DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA



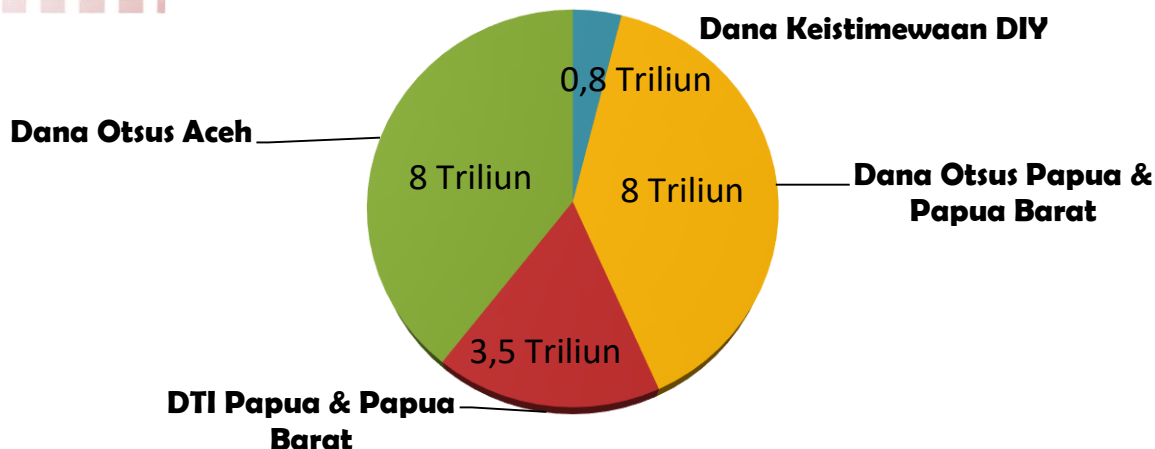
JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH

### ALOKASI DID TAHUN 2011 - 2017





# KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY DALAM APBN TA 2017



**Otsus Aceh : 8,02 T**

- Untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (UU No.11 Tahun 2006).

**Otsus Papua & Papua Barat :**  
**Papua : 5,62 T (70%)**  
**Papua Barat : 2,42 T (30%)**

- Terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan (UU No.21 Tahun 2001).

**DTI Papua & Papua Barat**  
**Papua : 2,63 T (75%)**  
**Papua Barat : 0,88 T (25%)**

- Untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya.

**Dana Keistimewaan DIY : 0,8 T**

- Dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Keistimewaan DIY sesuai UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.



# KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBN TA 2017



## 1 Dialokasikan untuk 74.954 Desa

Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

## 2 Cara penghitungan konsisten dengan tahun sebelumnya

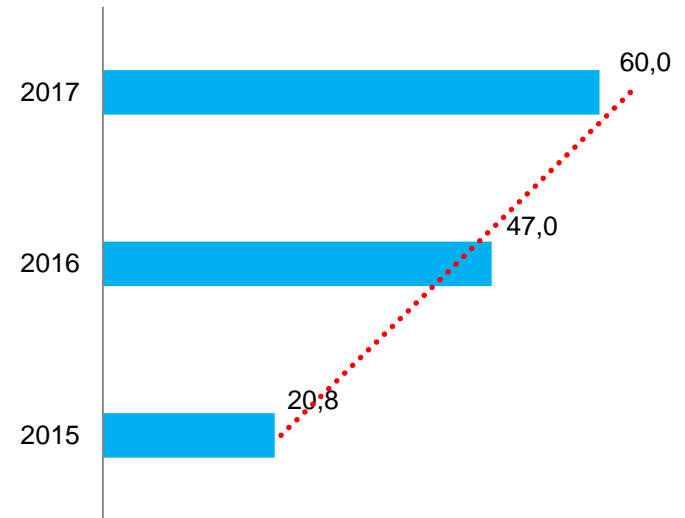
Pengalokasian Dana Desa TA 2017 menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

- sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD); dan
- sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.

## 3 Pengalokasian mempertimbangkan

- Aspek pemerataan dan keadilan;
- Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan
- Standar deviasi yang paling rendah.

### Trend Alokasi Dana Desa (triliun Rp)



Tahun	Proporsi (AD:AF)	AD (jt)	Rata-Rata	Bobot (JP:PM:LW:IKK)	Min DD (jt Rp)	Max DD (jt Rp)	StdDev (jt Rp)	Rasio
2016	Pagu : 46.982,1 Miliar, Jumlah Desa: 74.754							
	90:10	565,4	628,5	25:35:10:30	569,44	2.221,12	48,88	1 : 4
2017	Pagu : 60.000 Miliar, Jumlah Desa: 74.954							
	90:10	720,44	800,49	25:35:10:30	726,71	2.819,64	62,25	1 : 4



# Pengendalian pembiayaan utang dalam batas yang wajar dan terjaga



Pembiayaan Anggaran (triliun rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selisih
<b>A. Pembiayaan Utang</b>	389,0	384,7	(4,3)
I. Surat Berharga Negara (Neto)	404,3	400,0	(4,3)
II. Pinjaman (Neto)	(15,3)	(15,3)	0,0
<b>B. Pembiayaan Investasi</b>	(49,1)	(47,5)	1,7
I. Investasi Kepada BUMN	(4,0)	(4,0)	0,0
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(3,2)	(6,8)	(3,6)
III. Investasi Kepada BLU	(34,9)	(34,7)	0,1
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(2,0)	(2,0)	0,0
V. Cadangan Pembiayaan Investasi	(5,1)	0,0	5,1
<b>C. Pemberian Pinjaman</b>	(6,4)	(6,4)	0,0
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(6,4)	(6,4)	0,0
1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto)	(6,4)	(6,4)	0,0
<b>D. Kewajiban Penjaminan</b>	(0,9)	(0,9)	0,0
<b>E. Pembiayaan Lainnya</b>	0,3	0,3	0,0
I. Hasil Pengelolaan Aset	0,3	0,3	0,0
<b>JUMLAH</b>	<b>332,8</b>	<b>330,2</b>	<b>(2,7)</b>

- SBN akan diarahkan untuk melakukan pendalaman pasar domestik untuk mendukung pasar SBN yang lebih *sustainable*
- Pinjaman Dalam Negeri difokuskan untuk alutsista dan almatsus Kemenhan dan Polri
- Pinjaman Luar Negeri dilakukan secara selektif terutama untuk bidang infrastruktur dan energi, pinjaman tunai sebagai alternatif pembiayaan, dan pemenuhan cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri





# Pembiayaan investasi untuk mendorong sektor prioritas dan kegiatan ekonomi masyarakat

Uraian (triliun rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selish
<b>I. Investasi Kepada BUMN</b>	<b>(4,0)</b>	<b>(4,0)</b>	<b>-</b>
1 PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	(1,0)	(1,0)	-
2 PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,0)	(1,0)	-
3 PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(2,0)	(2,0)	-
<b>II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(6,8)</b>	<b>(3,6)</b>
1 PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(3,2)	(3,2)	-
2 PMN kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	-	(3,6)	(3,6)
<b>III. Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>-</b>
<b>IV. Investasi Kepada BLU</b>	<b>(34,9)</b>	<b>(34,7)</b>	<b>0,1</b>
1 Dana Bergulir	(10,7)	(10,7)	-
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(9,7)	(9,7)	-
b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	(0,5)	(0,5)	-
c. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	(0,5)	(0,5)	-
2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	(2,5)	(2,5)	-
3 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(21,7)	(20,0)	1,7
4 Pusat Investasi Pemerintah	-	(1,5)	(1,5)
<b>V. Cadangan Pembiayaan Investasi</b>	<b>(5,1)</b>	<b>-</b>	<b>5,1</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>(49,1)</b>	<b>(47,5)</b>	<b>1,7</b>

- PMN untuk BUMN bidang keuangan (PT PII, PT SMF, dan PT SMI) guna mendukung infrastuktur
- Dana Bergulir pembiayaan perumahan → program sejuta rumah yang akan dialokasikan untuk pembiayaan KPR MBR;
- Dana Pengembangan Pendidikan Nasional → meningkatkan kemampuan penyaluran beasiswa, membantu pendanaan riset, rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam;
- Pembiayaan investasi kepada BLU Aset/Tanah (LMAN) → mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur (*land bank*)
- PMN Kepada LPEI → meningkatkan kapasitas pembiayaan, penjaminan dan asuransi berorientasi ekspor, serta penugasan khusus expor (*National Interest Account*).
- PMN kepada BPJS Kesehatan → untuk mengurangi defisit Program DJS Kesehatan.
- Investasi Kepada BLU PIP → untuk fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.



# Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya



Uraian (triliun rupiah)	2017		
	RAPBN	APBN	Selisih
<b>A. Pemberian Pinjaman</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(0,0)</b>
<b>I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(0,0)</b>
1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto)	(6,4)	(6,4)	(0,0)
a Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto)	(10,1)	(10,1)	(0,0)
b Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	3,7	3,7	0,0
<b>B. Kewajiban Penjaminan</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>-</b>
<b>I. Penjaminan Pemerintah</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>-</b>
1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(0,7)	(0,7)	-
2. Penugasan kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	(0,2)	(0,2)	-
<b>C. Pembiayaan Lainnya</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>
I. Hasil Pengelolaan Aset	0,3	0,3	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(7,0)</b>	<b>(7,0)</b>	<b>(0,0)</b>

- Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Badan lainnya → terutama untuk infrastruktur
- Kewajiban penjaminan untuk:
  - (i) percepatan Infrastruktur Nasional terutama untuk proyek kelistrikan, air minum, dan jalan tol
  - (ii) penugasan pembiayaan infrastruktur daerah terutama untuk proyek jalan, jembatan, dan rumah sakit.